



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN
STATISTIK

START | SAE



Menyusun laporan sebagai bagian dari pelaksanaan
Keterbukaan publik
Memiliki indikator pencapaian dengan adanya data
yang dihasilkan instansi
Pemerintah perlu mengetahui aspek hukum, manajemen
keuangan, dan algoritma media sosial.



Dinas Komunikasi, Informatika,
dan Statistik Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar



@diskominfor

diskominfor

diskominfor

diskominfor

diskominfor

diskominfor

diskominfor

diskominfor

diskominfor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya LKjIP Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Blitar dapat diselesaikan. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Blitar, 28 Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik,



Drs. Hakim Sisworo, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196909081988091001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Walikota Blitar, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo periode 2021-2026, Dimana ditetapkan 1 (satu) Tujuan dan 5 (Lima) Sasaran Strategis. Sasaran Strategis beserta capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan yaitu Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Indikator Kinerja Indeks SPBE dengan target 4.25 terealisasi 4.26 sehingga diperoleh capaian 100.23% dengan kategori sangat berhasil.
2. Sasaran 1 adalah Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK.
Indikator Kinerja Persentase layanan publik online dan terintegritasi dengan target 100% terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan kategori sangat berhasil.
3. Sasaran 2 adalah Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik.
Indikator Kinerja Nilai Hasil Monev PPID dengan target 98 terealisasi 98.61 sehingga diperoleh capaian 100.62% dengan kategori sangat berhasil.
4. Sasaran 2 adalah Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik.
Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dengan target 100% terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan kategori sangat berhasil.
5. Sasaran 3 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor.
Indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam

menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi Pembangunan dengan target 100% terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan kategori sangat berhasil.

6. Sasaran 3 adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor. Indikator Indeks Pembangunan Statistisk target 2.9 terealisasi 2.91 sehingga diperoleh capaian 100.34% dengan kategori sangat berhasil.
7. Sasaran 4 adalah Meningkatnya Keamanan Informasi. Indikator Indeks KAMI dengan target 62.02 % terealisasi 62.02% sehingga diperoleh capaian 100 dengan kategori sangat berhasil.
8. Sasaran 5 adalah Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 87.50 terealisasi 86.45 sehingga diperoleh capaian 98.8%

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis yang tertuang pada Perubahan Renstra 2021-2026, Perubahan Rencana Kerja 2025, dan telah diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025.

Dalam pelaksanaan kinerja tersebut jumlah anggaran belanja sebesar Rp 15.629.337.092,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 15.005.918.098,00

Secara keseluruhan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar selama tahun anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang **Sangat Berhasil** dengan ditandai oleh rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar tahun 2025 dengan nilai 101% (*Seratus Satu Persen*) dengan realisasi sebesar Rp 15.005.918.098,00.

Blitar, 28 Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik,



Drs. Hakim Sisworo, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196909081988091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-aspek Strategis	9
F. Isu-isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	17
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi 2025	20
2. Perbandingan Ralisasi Kinerja Tahun 2022 – 2025	42
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra.....	51
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	52
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)	54
1. Menghitung Alokasi Per Tujuan dan/atau Sasaran Pembangunan	63
2. Menghitung Pencapaian Kinerja dan Anggaran	65
3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	68
C. Prestasi dan Penghargaan	72
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74

B. Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2025	75
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berakhirnya satu tahun anggaran maka sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. LKjIP merupakan penjelasan ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Rencana Strategis Perubahan 2021-2026, Perubahan Rencana Kerja 2025, dan diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025

LKjIP Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian tidak terpisahkan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada institusi negara/ pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

LKjIP diperlukan sebagai pengukuran pelaksanaan kinerja institusi negara/ pemerintah sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja yang telah ditetapkan serta di perjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar merupakan proses untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan renstra perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan ke depannya dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi peningkatan kinerja instansi sekaligus menjadi tolok ukur dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan lagi melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas pokok dan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
- b. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;

- c. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- f. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Susunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum , dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik
- d. Bidang Aplikasi Informatika
- e. Bidang Statistik dan Persandian
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar.



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar pada Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun LKjIP Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota

- Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
 20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
 23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Aspek-aspek Strategis

Sebagai unsur penunjang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan teknis dan pelaksana program urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian
2. Pembina dan Pendamping Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), *Media Partner*, *Influencer*, Relawan TIK, SATU DATA Indonesia, Keterbukaan Informasi Publik, dan keamanan Informasi
3. Agenda Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026 untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang bersaing melalui penyediaan infrastruktur komunikasi, melakukan komunikasi publik dan mendeliver substansi terkait digitalisasi melalui sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

F. Isu-isu Strategis

Menjawab permasalahan-permasalahan pada tahun 2025 maka dapat dikemukakan isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar sebagai berikut:

1. Kesiapan Pemerintah Kota Blitar dalam menyongsong implementasi Pemerintahan Digital sebagai peralihan dari SPBE melalui perencanaan terarah, integrasi data, dan peningkatan kualitas layanan digital kepada Masyarakat
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses

layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;

3. Pembinaan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ;
4. Belum optimalnya penyebaran, penyediaan, dan pemanfaatan informasi publik oleh Pemerintah Daerah secara aktif dan berkelanjutan, sehingga akses masyarakat terhadap informasi yang bermanfaat belum merata.
5. Kualitas pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah Daerah yang dapat diakses masyarakat secara mudah dan cepat masih perlu ditingkatkan guna mendukung keterbukaan informasi dan kepercayaan publik.
6. Pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
7. Pengembangan Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintah yang berkualitas dan efisien.
8. Peningkatan Keamanan Informasi dan Perlindungan Data serta peningkatan pemanfaatan sistem elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Blitar sesuai standar SNI/IEC 27001:2022
9. Peningkatan Tata Kelola Data dan Satu Data Daerah Pemerintah Kota Blitar serta optimalisasi penerapan prinsip Satu Data Daerah, termasuk kualitas, konsistensi,

dan pemanfaatan data lintas perangkat daerah guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan di Kota Blitar.

10. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM TIK di bidang keamanan informasi, pengelolaan data, dan pengembangan aplikasi Pemerintah Kota Blitar guna mendukung transformasi digital di Kota Blitar.

11. Pengembangan Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikasi Elektronik dalam proses administrasi pemerintahan di Kota Blitar guna mendukung layanan umum yang cepat, efisiensi dan berkualitas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 – 2026

Perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perlunya suatu perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan dimana rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bentuk komitmen organisasi dalam pencapaian kinerja sekaligus sebagai pedoman untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/ Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada instansi pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar menjalankan Visi Kota Blitar “*Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur, dan Bermartabat* pada Tahun 2021 – 2026 . Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis,

Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar termasuk pada misi ke-5 RPJMD, yaitu “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”. Menjabarkan misi tersebut, Rencana Strategis (Renstra) mempunyai tujuan yaitu “Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatkan layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK;
2. Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. Meningkatnya Keamanan Informasi.
5. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar secara rinci dapat dilihat pada ”Lampiran. I LKjIP 2024, Matriks Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk Indikator Tujuan, Kinerja Utama dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

Table 1 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET 2025	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	$(\text{Bobot} \times \text{Domain Kebijakan SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Domain Tata Kelola SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Layanan SPBE})$	4.25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
2	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi $\text{Jumlah layanan publik} \times 100 \%$	100%	Bidang Aplikasi Informatika
3	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	98	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%	100%	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/	100%	Bidang Statistik dan Persandian

		perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	jumlah OPD X 100%		
		Indeks Pembangunan Statisik	$\sum \text{ bobot domain } k \times \text{ nilai domain } k$ $k=1$	2,9	Bidang Statistik dan Persandian
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	62.02	Bidang Statistik dan Persandian
6	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 87.50	Sekretariat

Perjanjian kinerja tahun 2025 dimaksudkan sebagai komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan diberikan anggaran sesuai kebutuhan. Dengan adanya perjanjian kinerja juga sebagai panduan dan arahan bagi OPD untuk memenuhi target yang ditetapkan dan pada akhirnya dapat mencapai target dari rencana strategis OPD.

C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	a. Kurangnya pemahaman bahwa dokumen manajemen SPBE harus disahkan secara resmi b. Penetapan dokumen memerlukan proses yang sistematis c. Masih ada beberapa dokumen manajemen SPBE	Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE dan menyusun dokumen manajemen yang tersedia.	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan	√		Adanya rasionalisasi dan efisiensi pada rekening Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika khususnya kegiatan penyusunan

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	yang belum tersusun		peta rencana SPBE pemerintah daerah			standar manajemen kompetensi SDM TIK dan penyusunan standar manajemen risiko SPBE sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan optimalisasi tim koordinasi SPBE dengan cara

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
						peningkatan kapasitas yang diikuti oleh anggota tim. Peningkatan kapasitas tersebut yaitu mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Layanan TI berbasis ISO 20000 pada tanggal 10-14 Juni 2025 sehingga menambah pemahaman kepada anggota tim koordinasi SPBE mengenai

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
						manajemen layanan serta sebagai persiapan dalam implementasi Pemerintahan Digital
1	Dari 43 jenis layanan yang harus terpenuhi sebagian besar dilakukan oleh PD sehingga kurangnya intervensi untuk memenuhi target yang ditetapkan	● Mengoptimalkan Tim Asistensi Aplikasi untuk menetapkan target sesuai dengan jenis layanan yang harus dipenuhi	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan	√		Koordinasi yang dilakukan oleh tim kerja aplikasi dengan Dinas PUPR pada tanggal 13 Februari 2025 terkait dengan pemenuhan jenis layanan jalan dan jembatan

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			peta rencana SPBE pemerintah daerah			sehingga dapat mengetahui ketersediaan aplikasi tersebut sebagai pemenuhan capaian target kinerja layanan publik online dan terintegrasi
2	● Perangkat Daerah masih ragu dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ● Padatnya agenda Pimpinan baik Nasional maupun regional yang bersamaan dengan pelaksanaan wawancara Keterbukaan Informasi Publik	1. Optimalisasi dukungan perangkat daerah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2. Optimalisasi dukungan pimpinan dalam proses Monev Keterbukaan informasi publik 3. Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran	- Program Informasi Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	√		Tindaklanjut dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dengan mengadakan Rakor, Bimtek dan Monev PPID. Selain itu juga sudah

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	● Belum maksimal alokasi anggaran untuk meningkatkan keterbukaan informasi public ● Belum adanya integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik antara pengaduaan lokal milik Pemerintah Kota Blitar (ULPIM) dengan Website SP4N LAPOR! sehingga perlu adanya penginputan ulang; ● Banyaknya aplikasi dan kanal aduan di perangkat daerah	keterbukaan informasi publik ● Penguatan kebijakan kelembagaan (anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas) serta penguatan tata laksana pengelolaan pengaduan instansi pengintegrasian pengaduan ke SP4N LAPOR! ● Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah untuk mempercepat tindaklanjut pengaduan oleh Admin dan Pejabat Penghubung ● Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan kompetensi kepada sumber daya manusia termasuk aparatur				dilakukan rekap anggaran di perangkat daerah dan sudah ada anggaran publikasi informasi di DPA masing-masing. Dukungan pimpinan juga sudah optimal di tahun 2025 dengan hadirnya Wali Kota dalam agenda wawancara Monev Keterbukaan Informasi

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	● Keterbatasan jumlah SDM sebagai admin pengelola pengaduan di perangkat daerah; ● Adanya rotasi pegawai yang dapat mengganggu kontinuitas penanganan pengaduan di perangkat daerah. ● Masih adanya disposisi/pemilahan dari admin pusat yang kurang tepat sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan pengaduan dari masyarakat.	dalam penerapan SP4N LAPOR! supaya penanganan pengaduan dari masyarakat bisa di respon dengan baik. ● Memperbanyak informasi/konten publikasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan di berbagai media. ● Melaksanakan monitoring rutin bulanan kepada Pejabat Penghubung terkait pengelolaan pengaduan dengan menyampaikan rekap laporan penanganan pengaduan SP4N LAPOR! secara periodik tahunan sebagai rekomendasi perubahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.				Publik Tahun 2025. Dengan pendekatan ke perangkat daerah, dapat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik Tindak lanjut telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025, antara lain melalui

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
						penerbitan Perwali No. 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan, penetapan SK Tim Pengelola Pengaduan Publik, pembentukan WhatsApp Group Tim sebagai sarana percepatan koordinasi, menggelar bimbingan teknis yang dilakukan pada bulan Juni

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
						dengan tema “Berdaya dalam Menangani Pengaduan, Bersama Tingkatkan Kualitas Pelayanan”, monitoring evaluasi pengelolaan pengaduan pada bulan November dengan tema “Dari Aduan Menjadi Aksi Perbaikan” serta penguatan publikasi melalui website, media sosial,

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
						videotron, dan radio. Upaya tersebut berdampak pada optimalisasi tata kelola pengaduan dengan capaian tindak lanjut laporan sebesar 100% dan rata-rata waktu tindak lanjut 1,4 hari.
3	● Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Diantaranya,	● Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan pada perangkat daerah. ● Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	√		● Melaksanakan Desk DSSD SIPD Ewalidata pada Minggu ke-4 November

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	● Belum semua Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan statistik mengajukan rekomendasi statistik. ● Penyelenggaraan statistik sektoral belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia ● Belum terbangunnya data spasial Pemerintah Kota Blitar	daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi. ● Perlunya pembangunan portal data spasial Pemerintah Kota Blitar ● Pembangunan portal data spasial Pemerintah Kota Blitar.	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			2025 sehingga tersedianya DSSD yang ditetapkan dalam SK Penyebarluasan DSSD Ewalidata ● Memberikan rekomendasi kegiatan statistik yang diajukan oleh Perangkat Daerah tahun 2025 sehingga terbit rekomendasi dari Pembina Data /BPS

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
						Melaksanakan replikasi portal data geospasial dari Pemprov Jatim pada Desember 2025 sehingga menghasilkan aplikasi Satu Peta Kota Blitar
4	a. Rendahnya pemahaman pengelola KAMI perangkat daerah dalam mengkategorikan sistem elektronik yang dikelola termasuk kerangka kerja pengelolaan keamanan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ASN pengelola kemananan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tentang pengelolaan keamanan informasi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan BSSN Memberikan rekomendasi pada	- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	√		Dengan adanya upaya peningkatan pengetahuan bagi pengelola keamanan informasi dapat meningkatkan pemahaman

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	informasi, pengelolaan aset informasi, penerapan teknologi dan keamanan informasi, perlindungan data pribadi dan keterlibatan penyedia layanan keamanan informasi; b. Belum tersedianya dokumen kebijakan, tata kelola, dan prosedur pengelolaan keamanan informasi yang memadai; c. Rendahnya minat pengelola KAMI perangkat daerah terhadap peningkatan	perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian Indeks KAMI	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -			pentingnya penerapan pentingnya penilaian tingkat keamanan informasi Kegiatan peningkatan pengetahuan diwujudkan dengan mengadakan Koordinasi / bimbingan teknis pengukuran tingkat keamanan informasi

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	capaian tingkat keamanan informasi pada perangkat daerah.					Perangkat Daerah menggunakan Indeks KAMI dan Penyusunan Profil Risiko keamanan siber Perangkat Daerah pada tanggal 29-30 September 2025
5	● Pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual belum memanfaatkan	- Berkoordinasi dengan Bag. Organisasi terkait pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai acuan dalam penataan/penyesuaian (Refocusing Organisasi)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan	√		Pada bulan Januari waktu penyusunan renaksi baik OPD maupun secara individu Desk OPD dan

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	teknologi informasi serta kurangnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pentingnya pengukuran kinerja serta pemanfaatannya untuk perencanaan kedepannya. ● Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan ataupun peningkatan akuntabilitas, peningkatan	- Melakukan internalisasi dan penekanan tugas kepada seluruh pegawai untuk lebih aktif dan perhatian terhadap materi dan kondisi data pendukung Laporan Kinerja. - Menyusun rencana kerja memanfaatkan hasil tindak lanjut evaluasi kinerja sebelumnya	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Koordinasi dengan bidang dalam penyusunan Kinerja menyesuaikan dengan TUPOKSI dan RENSTRA OPD. Tersusunya data Kinerja baik secara file maupun melalui Aplikasi 1. Pada Januari minggu II Tahun 2026 2. Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pegawai atas hasil capain

No	Permasalahan/Kendala yang dihadapi	Strategi /Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	efektifitas, efisiensi kinerja dan peningkatan kinerja.					kinerja tahun 2025 3. Perubahan budaya kinerja menjadi lebih berorientasi hasil, peningkatan kapasitas organisasi, serta pelayanan publik yang lebih berkualitas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi baik dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis unit kerja untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam penyusunannya, laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dibuat berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan Tata Cara Review atas LKjIP Instansi Pemerintah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar diperoleh dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan realisasi yang dicapai. Sedangkan cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dari pengukuran kinerja dapat dilihat gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025, realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian	=	Realisasi	x 100 %
		Target	

2. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian	=	Realisasi – (Realisasi – Target)	x 100 %
		Target	

Dengan kriteria penilaian pada capaian masing – masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Table 2 Kriteria Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil

4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil
----	--------	---------------------------------	----------------

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3 Pencapaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	4,25	4,26	100.23%
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100%	100%	100%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	98	98,61	100.62%
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100,00%
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	100%	100,00%

	pembangunan dan evaluasi pembangunan			
	Indeks Pembangunan Statistisk	2,9	2.92	100.68%
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	62.02 %	62.02%	100%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50	86,45	98,8%

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi 2025

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti hasil analisis sebagai berikut :

a) Indikator Tujuan

Tujuan :

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

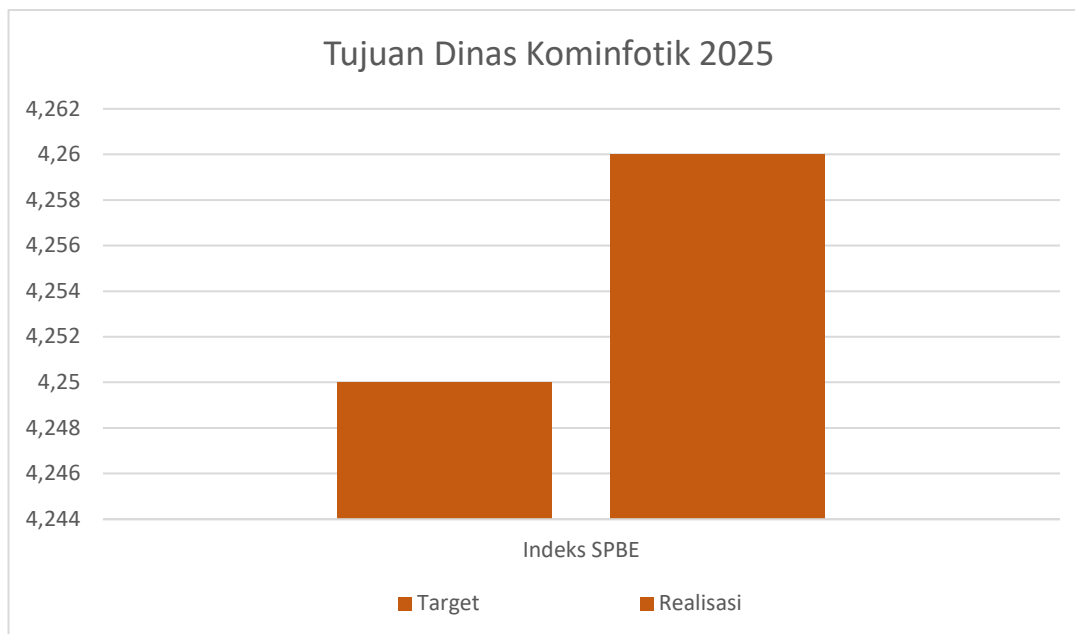
Indikator Tujuan :

Indeks SPBE

Table 4 Pencapaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	4,25	4,26	100.23%

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	Kriteria Predikat Indeks SPBE Kota Blitar ditentukan dari 4 (empat) domain yaitu : 1) Kebijakan SPBE, 2) Tata Kelola SPBE, 3) Manajemen SPBE, 4) Layanan SPBE
1	4,2 - 5,0	Memuaskan	
2	3,5 - 4,2	Sangat Baik	
3	2,6 - 3,5	Baik	
4	1,8 - 2,6	Cukup	
5	<1,8	Kurang	



Target indeks SPBE Kota Blitar tahun 2025 sebesar 4.25 terealisasi sebesar 4,26 atau dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tahun 2025 merupakan tahun kelima penghitungan nilai indeks SPBE pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar serta RPJMD Kota Blitar tahun 2021 - 2026. Namun, di sisi lain tahun 2025 Kota Blitar tidak termasuk dalam Lokus Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB . Sehingga Pemerintah Kota Blitar melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE secara internal yang dilakukan oleh Tim Evaluator Internal SPBE Pemerintah Kota Blitar.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital, di mana Pemerintah Kota Blitar mulai mempersiapkan langkah strategis melalui pembinaan dan penguatan implementasi Pemerintahan Digital secara terintegrasi. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kota Blitar. Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu adanya tim koordinasi SPBE yang memiliki peran penting dalam menyusun strategi pencapaian indeks SPBE. Meskipun hasil indeks SPBE adalah SANGAT BAIK, namun masih terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi perolehan nilai yang perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya penetapan pada dokumen manajemen SPBE yang telah disusun yang disebabkan oleh :

1. Belum optimalnya pelaksanaan audit TIK
2. Kesesuaian arsitektur maupun peta rencana SPBE dengan realisasi kegiatan masih belum optimal

Sedangkan rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE antara lain :

1. Menyiapkan dokumen arsitektur Pemdi sebagai acuan pelaksanaan Pemerintahan Digital di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
2. Melaksanakan koordinasi bersama dengan Stakeholder terkait pelaksanaan audit TIK
3. Membentuk tim koordinasi Pemdi serta menentukan pembagian tugas dari masing-masing anggota tim
4. Melaksanakan rakor kolaborasi penyelenggaraan Pemdi guna persamaan persepsi sebagai persiapan implementasi Pemerintahan Digital

b) Indikator Sasaran 2

Tujuan :

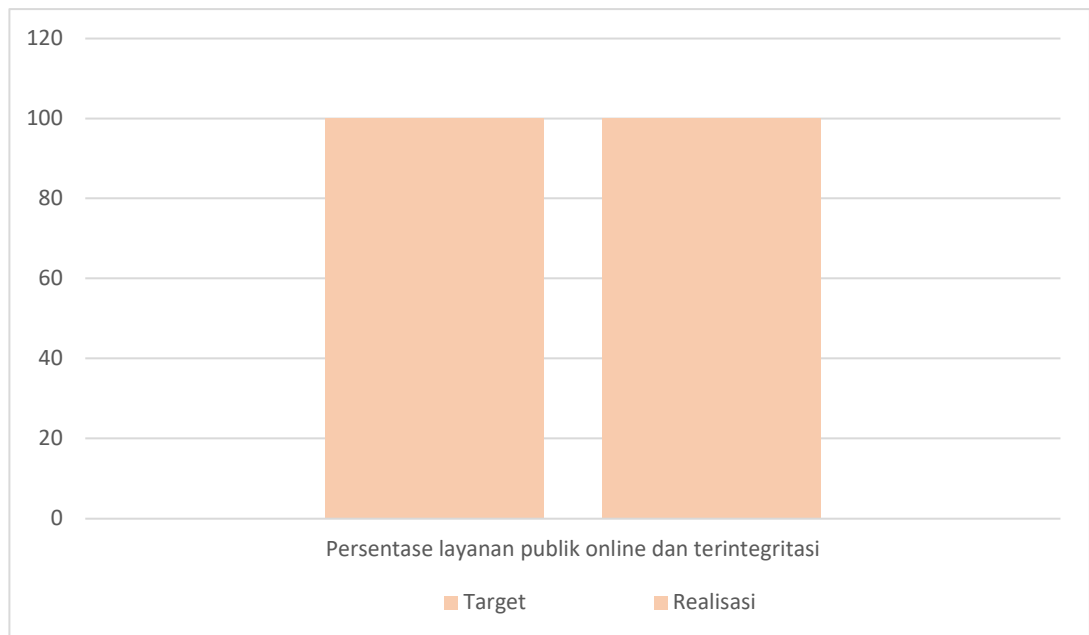
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK

Indikator Tujuan :

Persentase layanan publik online dan terintegrasi

Table 5 Pengukuran Realisasi Kinerja Presentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi/Jumlah layanan publik x 100 %	100%	100 %	100%



Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Indikator sasaran mengenai meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK pada tahun 2025 telah terealisasi 100 %

dari target sebesar 100 % Pada indikator ini dapat dikatakan **berhasil** karena telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal yaitu melalui kesiapan OPD mengampu aplikasi dalam mengintegrasikan aplikasi layanannya sehingga proses integrasi layanan dapat dilakukan. Pada tahun 2025 terdapat penyediaan layanan publik online dan terintegrasi yaitu layanan Jalan dan Jembatan dengan aplikasi layanan publik Bernama AMARTA (Aplikasi Manajemen Data Jalan dan Jembatan Kota Blitar

Sehingga pada tahun 2025 capaian kinerja layanan publik online dan terintegrasi diperoleh hasil 100% (naik 2% dari tahun 2024).

Untuk mencapai target 43 jenis layanan yang harus dipenuhi dalam capaian kinerja layanan publik online dan terintegrasi hingga mencapai hasil 100%, terdapat kendala maupun faktor penghambat yaitu PD yang hanya menggunakan aplikasi milik pemerintah pusat sehingga memerlukan penyediaan aplikasi layanan publik dan terintegrasi di tingkat daerah. Namun disisi lain, permasalahan tersebut dalam diminimalisir dengan adanya faktor pendukung dengan mengefektifkan peta rencana SPBE yang menyajikan arah strategis digitalisasi pemerintahan termasuk penyediaan sistem digital. Selain itu, adanya tim asistensi yang menetapkan target layanan yang harus dipenuhi juga memiliki peran penting sebagai pengingat kepada PD terkait.

Dari faktor penghambat dan faktor pendukung tersebut, tindak lanjut maupun rekomendasi yang dapat dilakukan kedepannya agar capaian kinerja layanan publik online dan terintegrasi dapat dicapai secara optimal adalah dengan adanya koordinasi antar PD untuk merekap jenis layanan publik online dan terintegrasi yang telah tersedia maupun menetapkan target layanan yang akan disediakan/dipenuhi.

Table 6 Data Jumlah Sistem Informasi Tahun 2025

NO	LAYANAN PUBLIK	TERSEDIA
		2025
1	Kependudukan	1
2	Perpajakan dan Retribusi	1
3	Pendaftaran dan Perijinan	1
4	Bisnis dan Inventasi	1
5	Pengaduan Masyarakat	1
6	Publikasi Info Umum dan Pemerintahan	1
7	Surat Elektronik	1
8	Sistem Dokumen Elektronik	1
9	Sistem Pendukung Keputusan	1
10	Kolaborasi dan Koordinasi	1
11	Managemen Pelaporan Pemerintah	1
12	Sistem Administrasi DPRD	1
13	Sistem Pemilu Daerah	1
14	Katalog Hukum Peraturan dan Perundangan	1
15	Sistem Informasi dan Managemen Data	1
16	Perencanaan Pembangunan Daerah	1
17	Sistem Perencanaan Proyek	1
18	Pengelolaan dan Monitoring Proyek	1
19	Sistem Evaluasi dan Info Pembangunan	1
20	Sistem Anggaran	1
21	Sistem Kas dan Perbendaharaan	1
22	Sistem Akuntansi Daerah	1
23	Pengadaan PNS	1
24	Sistem Absensi dan Penggajian	1
25	Sistem Penilaian PNS	1
26	Sistem Pendidikan dan Latihan	1
27	Pengelolaan Barang Daerah	1
28	Katalog Barang Daerah	1
29	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
30	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1

31	Potensi Daerah	1
32	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	1
33	Perikanan dan Kelautan	1
34	Pariwisata	1
35	IKM	1
36	Kesehatan	1
37	Pendidikan	1
38	Ketenagakerjaan	1
39	Industri dan Perdagangan	1
40	Jaringan Pengaman Sosial	1
41	Transportasi	1
42	Jalan dan Jembatan	1
43	Sarana Umum	1
JUMLAH		43

c) Indikator Sasaran 3

Tujuan :

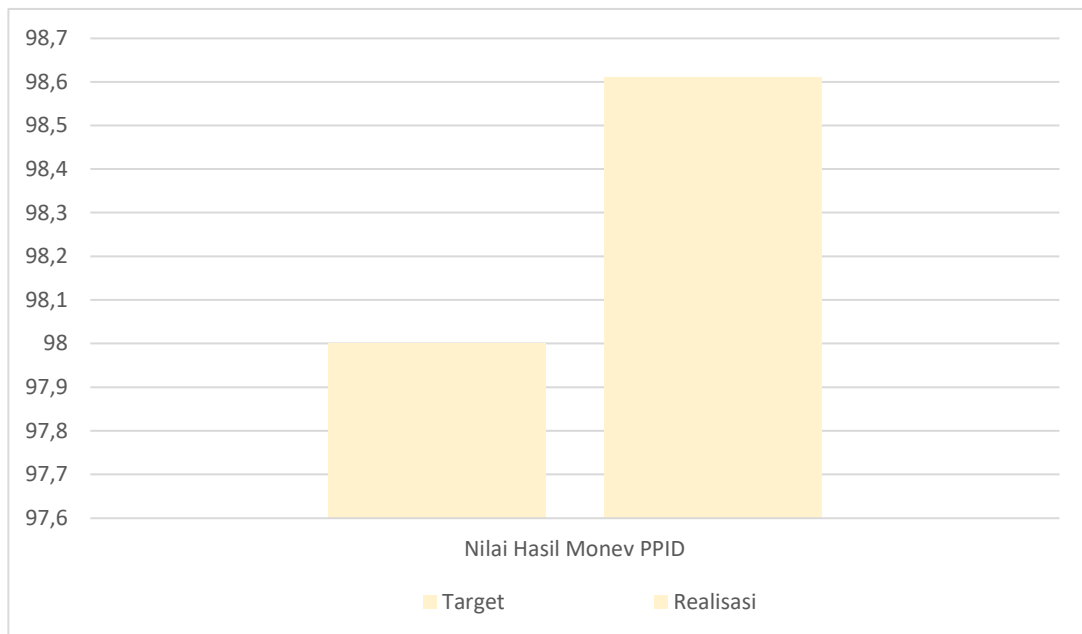
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik

Indikator Tujuan :

Nilai Hasil Monev PPID & Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Table 7 Pengukuran Realisasi Kinerja Nilai Hasil Monev PPID 2025

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik (Berdasarkan Perki No 1 Tahun 2022)	98	98.61	100.62%



Indikator kinerja nilai hasil Monev PPID pada tahun 2025 telah terealisasi 98.61 dari target sebesar 98. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator ini sangat berhasil/tercapai karena telah melampaui target yang ditetapkan. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator ini adalah:

- a) Komitmen pimpinan daerah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- b) Ketersediaan regulasi dan kebijakan internal terkait PPID
- c) Koordinasi dan sinergi yang baik antara PPID Utama dan PPID Pelaksana
- d) Ketersediaan dan kelengkapan dokumen pendukung keterbukaan informasi
- e) Pengelolaan layanan informasi publik yang berjalan konsisten
- f) Hasil visitasi yang menunjukkan pemenuhan standar keterbukaan informasi secara optimal

Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni:

- a. Pengisian SAQ masih memerlukan penyempurnaan pada aspek kelengkapan profil pimpinan dan penataan rujukan dokumen pendukung
- b. Belum optimalnya persiapan teknis wawancara, khususnya dalam penyelarasan narasi dan penekanan substansi jawaban dengan indikator penilaian

Hambatan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan pemutakhiran dan pelengkapan profil pimpinan daerah secara berkala
- b. Menyederhanakan dan menata rujukan dokumen pendukung pada pengisian SAQ agar lebih terstruktur
- c. Menyiapkan ringkasan narasi kunci keterbukaan informasi sebagai bahan pendukung wawancara pimpinan
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama PPID Pelaksana dalam persiapan monev keterbukaan informasi publik tahun berikutnya
- e. Menyusun inovasi Kelurahan Informatif untuk memperluas layanan keterbukaan informasi publik hingga tingkat kelurahan

d) Indikator Sasaran 3

Tujuan :

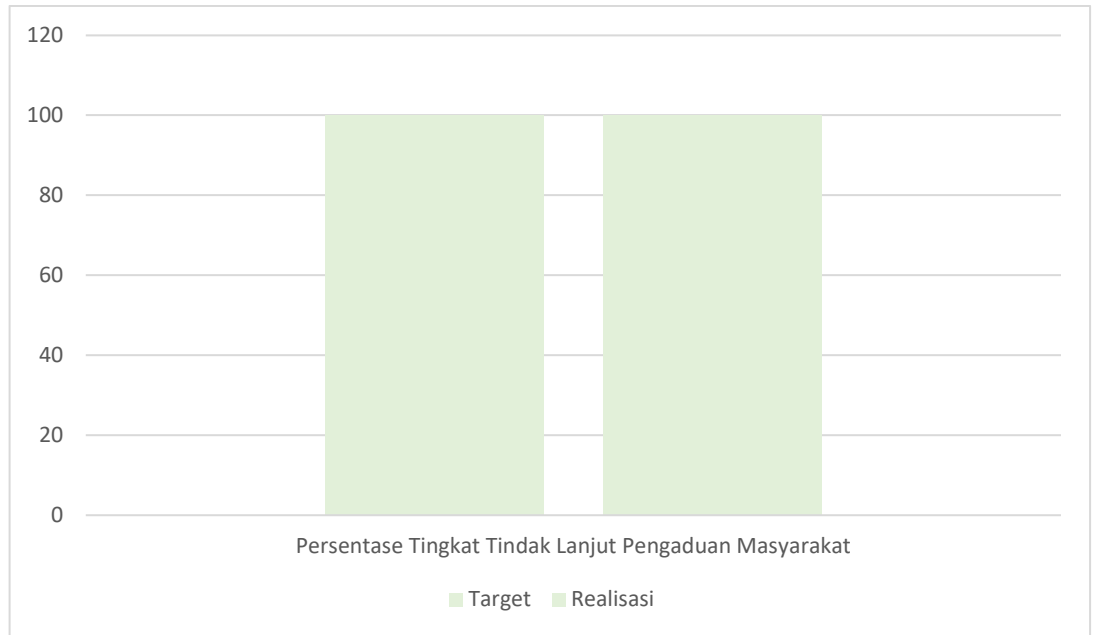
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik

Indikator Tujuan :

Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Table 8 Pengukuran Ralisasi Kinerja Indikator Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%	100%	100%	100 %



Indikator kinerja Presentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat pada tahun 2025 telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100%. Indikator ini dikatakan berhasil/tercapai karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Berikut beberapa factor pendukung tercapainya indikator ini:

1. Tersedianya kebijakan dan regulasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Adanya komitmen kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam mendorong peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat.
3. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan pengaduan, termasuk pemanfaatan sistem SP4N-LAPOR! dan kanal pengaduan resmi perangkat daerah.
4. Terbangunnya mekanisme koordinasi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan perangkat daerah dalam proses pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan.

Permasalahan yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini, yakni:

1. Proses integrasi kanal pengaduan perangkat daerah dengan SP4N LAPOR! belum berjalan secara optimal dan konsisten
2. Sosialisasi dan kampanye pengelolaan pengaduan masih bersifat insidental dan belum didukung dengan perencanaan yang terjadwal dan berkelanjutan
3. Pemanfaatan kanal pengaduan pada perangkat daerah masih kurang efektif, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi pencatatan dan penanganan aduan
4. Keterbatasan jumlah serta kapasitas SDM yang ditugaskan sebagai pengelola pengaduan
5. Masih adanya disposisi/pemilahan dari admin pusat yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penanganan aduan

Permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan beberapa upaya berikut:

- a. Melakukan monitoring pelaksanaan integrasi pengaduan, pendampingan input manual pengaduan, serta melakukan penyegaran melalui Bimbingan Teknis bagi admin pengelola pengaduan agar integrasi dapat berjalan lebih konsisten
- b. Menyusun strategi sosialisasi pengaduan masyarakat secara terjadwal dengan memanfaatkan berbagai media pemerintah daerah dan menggandeng UPT, Kelurahan, dan Kelompok Informasi Masyarakat
- c. Penataan kanal pengaduan pada perangkat daerah, identifikasi alur pengelolaan pengaduan, serta penyelarasan mekanisme pencatatan aduan yang masuk ke berbagai kanal agar tetap terdokumentasi dan terpantau SP4N LAPOR!
- d. Memperkuat tata kelola pengaduan dengan peningkatan kapasitas dan keberlanjutan SDM pengelola pengaduan, pembaruan SK Tim Pengelola Pengaduan sesuai dengan dinamika kepegawaian dan struktur organisasi

- e. Optimalisasi mekanisme disposisi dan verifikasi aduan dengan penguatan standar operasional prosedur sehingga penyaluran aduan ke perangkat daerah terkait dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai kewenangan.

e) Indikator Sasaran 5

Tujuan :

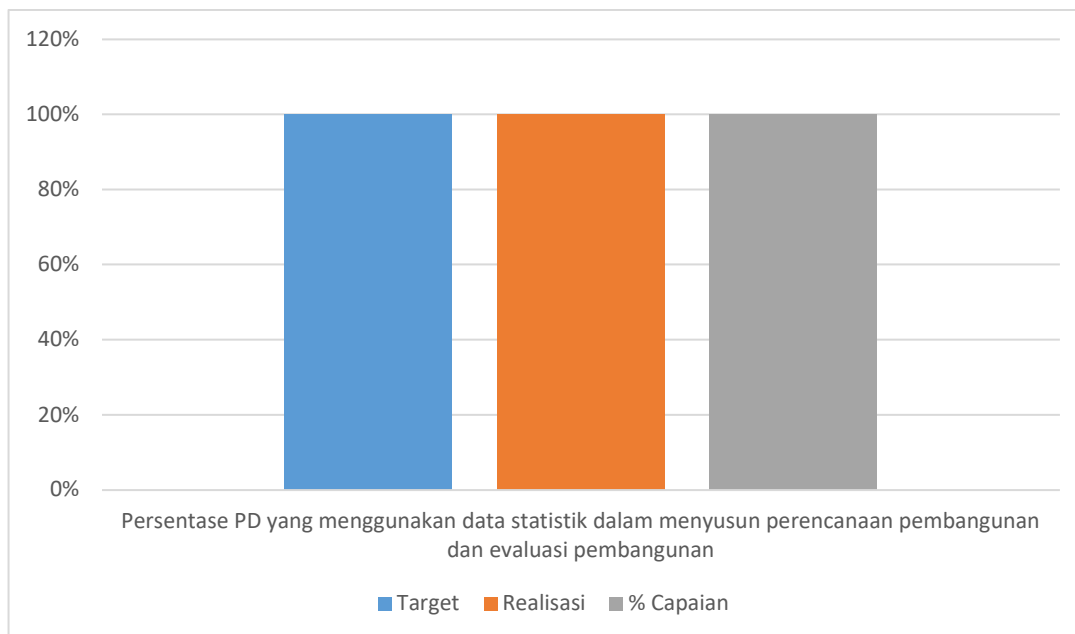
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor

Indikator Tujuan :

Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan

Table 9 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 5 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	100%	100%	100 %



Indikator sasaran 5 pada tahun 2025 telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. Pada indikator ini dapat dikatakan berhasil/tercapai karena sudah sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada aplikasi data telah ditetapkan jenis data yaitu Renja 2026 dan LKJIP 2024 yang akan dipublikasikan dari 30 perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kota Blitar. Pada tahun 2025 ini telah terkumpul data dari 30 perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Table 10 Daftar Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Blitar Tahun 2026

No.	OPD	Perencanaan	
		Data Sektoral	Analisis
1	Sekretariat Daerah	✓	✓
2	Bappeda	✓	✓
3	BPKAD	✓	✓
4	BPKSDM	✓	✓
5	Sekretariat DPRD	✓	✓

6	Inspektorat Daerah	✓	✓
7	Dinas Pendidikan	✓	✓
8	Dinas Kesehatan	✓	✓
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓
10	Dispera dan KP	✓	✓
11	Dinas Sosial	✓	✓
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	✓	✓
13	Dinas P3A, P2 dan KB	✓	✓
14	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓
16	Dinas Perhubungan	✓	✓
17	Diskominfotik	✓	✓
18	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	✓	✓
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	✓	✓
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓	✓
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	✓	✓
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	✓	✓
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	✓	✓
24	Satpol PP	✓	✓
25	Bakesbangpol	✓	✓
26	BPBD	✓	✓
27	Rumah Sakit Mardi Waluyo	✓	✓
28	Kecamatan Sananwetan	✓	✓
29	Kecamatan Kepanjenkidul	✓	✓
30	Kecamatan Sukorejo	✓	✓
Jumlah		100,00%	100,00%

Table 11 Daftar Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun Evaluasi Pembangunan Daerah di Kota Blitar Tahun 2024

No.	OPD	Evaluasi	
		Data Sektoral	Analisis
1	Sekretariat Daerah	✓	✓
2	Bappeda	✓	✓
3	BPKAD	✓	✓
4	BPKSDM	✓	✓
5	Sekretariat DPRD	✓	✓

6	Inspektorat Daerah	✓	✓
7	Dinas Pendidikan	✓	✓
8	Dinas Kesehatan	✓	✓
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓
10	Dispera dan KP	✓	✓
11	Dinas Sosial	✓	✓
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	✓	✓
13	Dinas P3A, P2 dan KB	✓	✓
14	Dinas Lingkungan Hidup	✓	✓
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓
16	Dinas Perhubungan	✓	✓
17	Diskominfotik	✓	✓
18	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	✓	✓
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	✓	✓
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓	✓
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	✓	✓
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	✓	✓
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	✓	✓
24	Satpol PP	✓	✓
25	Bakesbangpol	✓	✓
26	BPBD	✓	✓
27	Rumah Sakit Mardi Waluyo	✓	✓
28	Kecamatan Sananwetan	✓	✓
29	Kecamatan Kepanjenkidul	✓	✓
30	Kecamatan Sukorejo	✓	✓
Jumlah		100,00%	100,00%

Pada tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Blitar memanfaatkan data statistik sektoral sebagai dasar untuk merumuskan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, data sektoral yang valid digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan indikator sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Hal ini penting untuk memastikan target yang ditetapkan realistis dan sesuai dengan kapasitas sumber

daya. Pengisian data statistik sektoral di Kota Blitar ke depannya diarahkan melalui aplikasi E-WALIDATA pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah ini diambil untuk menyeragamkan data antar Perangkat Daerah dan mewujudkan prinsip Satu Data Indonesia. Pengisian data ke dalam aplikasi E-Walidata SIPD memastikan perencanaan tahun 2025 didasarkan pada data yang valid dan mutakhir.

Data statistik sektoral digunakan sebagai referensi utama dalam menentukan target dan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk tahun 2025, penyusunan IKU harus mengacu pada dua dokumen transisi, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026 dan RPJMD 2025–2029. Proses pengumpulan dan pemeriksaan data harus mengikuti SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Blitar. Data yang digunakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) idealnya telah terintegrasi di Portal Satu Data Kota Blitar (A-DATA) untuk menjamin validitas dan interoperabilitas antar perangkat daerah. Interpretasi hasil data statistik sektoral tahun berjalan digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Hal ini tercermin dalam tabel Rencana Tindak Lanjut LKjIP yang harus dicantumkan dalam dokumen perencanaan. Adapun Faktor pendukung capaian kinerja yaitu Tersedianya dokumen Renja dan LKjIP 30 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Blitar serta Laporan Hasil Sinkronisasi Data Statistik Sektoral Daerah pada SIPD e-Walidata, namun masih ada kendala yaitu Beberapa Perangkat Daerah mengalami keterlambatan dalam penyediaan dokumen LKjIP. Kendala tersebut dapat ditindaklanjuti dengan Inventarisasi elemen data statistik sektoral yang dimuat dalam dokumen Renja dan LKjIP dalam bentuk Nota Dinas dan/atau Laporan Hasil Sinkronisasi Data Statistik Sektoral Daerah pada SIPD e-Walidata.

Indikator Sasaran 6

Tujuan :

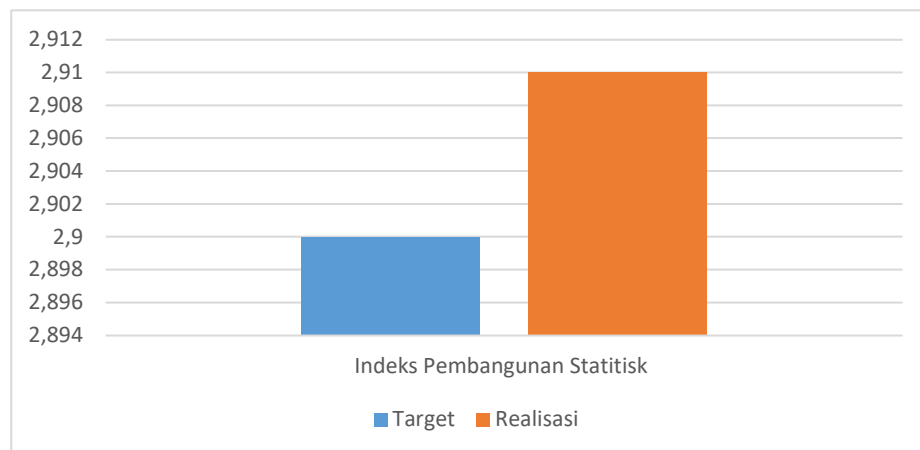
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor

Indikator Tujuan :

Indeks Pembangunan Statistisk

Table 12 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2025

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Statistisk	$\sum \text{ bobot domain } k \times \text{ nilaidomain } k$ $k=1$	2,9	2,92	100.68 %



Indikator sasaran 5 pada tahun 2025 telah terealisasi 2.91 dari target sebesar 2,9. Pada indikator ini dapat dikatakan sangat berhasil/tercapai karena walau belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar didukung oleh tersedianya standar data, metadata, serta interoperabilitas data yang telah diterapkan secara konsisten di seluruh Perangkat Daerah. Selain itu, adanya sistem monitoring dan evaluasi secara berkala turut membantu dalam perbaikan proses

penyelenggaraan statistik yang masih berada pada level rintisan maupun terkelola. Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya statistisi dan pranata komputer yang memiliki kompetensi di bidang EPSS, juga menjadi faktor pendukung utama. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain belum optimalnya kemampuan sebagian Perangkat Daerah dalam mengelola metadata statistik sesuai prinsip Satu Data Indonesia, munculnya ego sektoral yang mengakibatkan duplikasi data serta perbedaan definisi operasional antar Perangkat Daerah, serta belum tertibnya pengarsipan dokumen kegiatan statistik. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Blitar akan meningkatkan kompetensi ASN pengelola data dalam metodologi statistik dan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti, memperkuat peran statistisi dan pranata komputer melalui pelatihan dari instansi pembina seperti BPS dan Kementerian Kominfo, serta melakukan penertiban arsip dokumen pelaksanaan kegiatan statistik di seluruh Perangkat Daerah.

f) Indikator Sasaran 7

Tujuan :

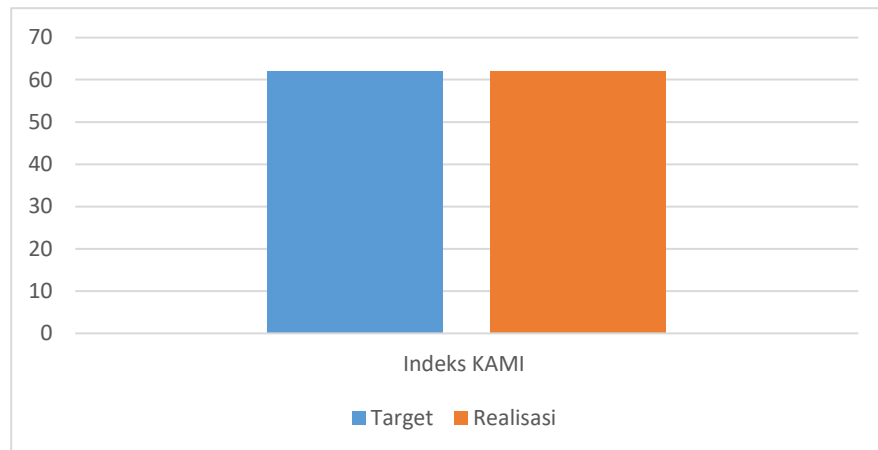
Meningkatnya Keamanan Informasi

Indikator Tujuan :

Indeks KAMI

Table 13 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Indeks KAMI 2025

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100%	62.02	62.02	100%



Indikator meningkatnya Keamanan Informasi pada tahun 2025 telah terealisasi 100% dari target sebesar 62.02 dengan realisasi 62.02. Pada indikator ini dapat dikatakan telah tercapai karena telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya pencapaian target pada indikator keamanan informasi yang ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rendahnya pemahaman aparatur Perangkat Daerah terhadap pentingnya kegiatan penilaian keamanan informasi;
2. Ketidaksiapan aparatur dalam menyediakan dokumen bukti dukung dalam kegiatan penilaian keamanan informasi.
3. Belum optimalnya upaya tindak lanjut aparatur Perangkat Daerah pasca dilakukan kegiatan koordinasi pengukuran tingkat keamanan informasi;

Pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar didukung oleh terpenuhinya penilaian pada area yang telah ditentukan, meliputi kategori sistem elektronik, area tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, aset informasi, teknologi, serta area suplemen. Selain itu, penilaian mandiri diawali dengan kegiatan bimbingan teknis penilaian tingkat kematangan keamanan informasi bagi Perangkat Daerah guna meningkatkan pemahaman teknis pengelola sistem elektronik. Pasca pelaksanaan bimbingan teknis, dilakukan desk

evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri dari seluruh pengelola sistem elektronik di masing-masing Perangkat Daerah. Kegiatan ini juga diperkuat melalui ekspos atau publikasi hasil penilaian mandiri tingkat kematangan keamanan informasi sebagai bentuk transparansi dan evaluasi bersama. Namun demikian, pelaksanaan penilaian masih dilakukan secara mandiri dan belum melibatkan Tim Penilai dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pihak eksternal yang berwenang.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 direncanakan koordinasi teknis lanjutan berupa bimbingan teknis penilaian tingkat keamanan informasi dan penyediaan template dokumen bukti dukung yang diperlukan guna memudahkan perangkat daerah dalam mendukung kegiatan penilaian keamanan informasi.

Sejalan dengan itu maka akan digelar pula pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) SNI ISO/IEC 27001:2022 dengan melibatkan Tim Audit Eksternal serta dilaksanakan pula pengukuran tingkat keamanan informasi menggunakan kerangka kerja Indeks KAMI versi 5.0 / IKASANDI oleh Tim BSSN berdasarkan standar penilaian keamanan informasi yang ditetapkan.

g) Indikator Sasaran 8

Tujuan :

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

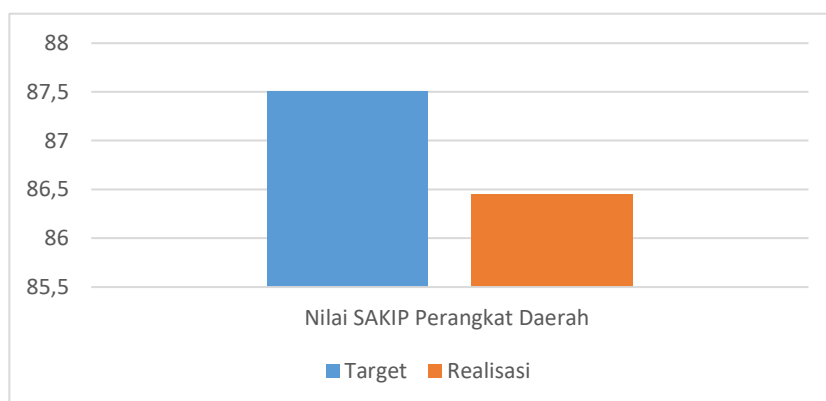
Indikator Tujuan :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Table 14 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah 2025

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
-------------------	-------------------	--------	-----------	-----------

Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD Berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	87,50	86,45	98.8%
------------------------------	--	-------	-------	-------



Indikator sasaran 8 pada tahun 2025 telah terealisasi 86.45 dari target sebesar 87.50 dengan capaian realisasi 98.8%. Indikator ini dapat dikatakan tercapai karena telah melebihi target yang ditetapkan dengan kategori **berhasil**.

Keberhasilan ini ditentukan oleh dukungan dari masing bidang untuk dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang memenuhi standar sesuai dengan pertauran yang telah di tetapkan.

Sedangkan untuk factor penghambat yaitu Belum optimalnya sistem integrasi data (crosscutting) baik secara internal maupun eksternal yang menghambat efisiensi kerja. Hambatan dalam menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator sehingga dokumen perencanaan tahunan kurang sinkron. Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak konsisten antara Renstra, Renja, dan LKjIP. Kecenderungan pegawai dalam menyusun laporan yang hanya bersifat normatif atau sekadar imbauan, tanpa didukung bukti aktivitas nyata yang terukur. Rendahnya kesadaran pegawai dalam melakukan penginputan data kinerja secara tepat waktu dan akurat. Kurangnya ketajaman dalam

mengidentifikasi rencana aksi yang efektif, sehingga sulit untuk memastikan adanya peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Tindak lanjut perbaikan 2025 :

1. **Perencanaan Kinerja:** Mewajibkan pencantuman inovasi strategis dalam Renstra 2025-2029, meningkatkan kecermatan penyusunan dokumen tahunan terkait indikator sasaran, serta menyusun SOP baku (melalui Keputusan Walikota) untuk tata kelola data statistik dan koordinasi *crosscutting*.
2. **Pengukuran Kinerja:** Memastikan konsistensi IKU di seluruh dokumen perencanaan (Renstra, Renja, LKjIP) dan beralih dari pelaporan normatif ke pencantuman aktivitas nyata yang konkret.
3. **Pelaporan Kinerja:** Memperluas cakupan bukti dukung laporan hingga ke seluruh pegawai serta mempertegas kedisiplinan penginputan data kinerja agar tepat waktu.
4. **Evaluasi Kinerja:** Mengoptimalkan identifikasi rencana aksi untuk memastikan adanya tren peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditunjukkan sebagaimana table berikut:

Table 15 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	100.23 %	✓			
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100%	✓			
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	100.62 %	✓			
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%	✓			
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100%	✓			
	Indeks Pembangunan Statistik	100.68 %	✓			
Meningkatnya	Indeks KAMI	100%	✓			

Keamanan Informasi						
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98.8%	✓			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis		100,04 %	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan, dapat diperoleh gambaran bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada 2025 masuk ke dalam kategori pertama atau “sangat berhasil” dengan nilai rata rata capaian 100,04% (Seratus Koma Nol Empat Persen).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2025

Realisasi Kinerja yang telah dihitung pada tahun 2025 ini, selanjutnya agar diketahui sejauh mana peningkatan kinerja disetiap indikator dalam memenuhi targetnya maka perlu dibandingkan realisasi antara kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya. Tabel perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Table 16 Perbandingan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022 - 2025

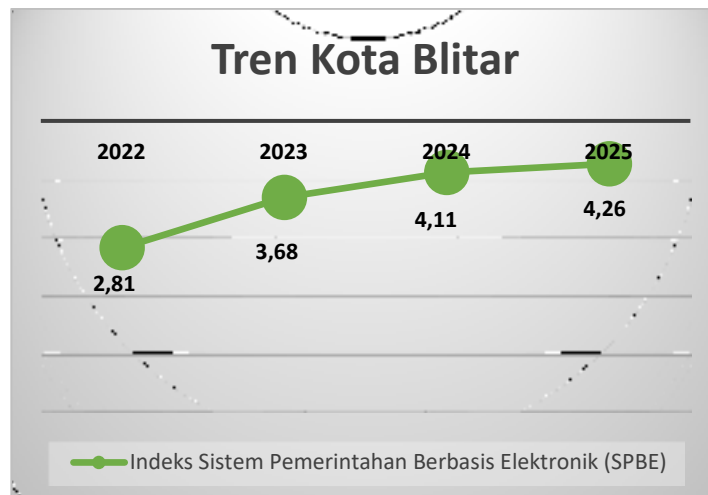
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	% CAPAIAN
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.31	2.81	122%	2.82	3.68	130,50%	3,9	4,11	105,38%	4,25	4,26	100.23%
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	89%	90 %	101,1 %	94%	94%	100%	98	98	100,00%	100%	100%	100%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	81%	76 %	93,8 %	86	88,69	103,13%	91	97,86	107,54%	98	98,61	100.62%
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat							100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	96%	100%	104,16 %	97%	100%	103,09%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
	Indeks Pembangunan Statistik							2,7	2,65	98,15 %	2,9	2.92	100.68%
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	38,76	39,4	101,65%	46,51	46,8	100,62%	54,26	59,95	110,49%	62,02	62.02	100%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28	84,82	101%	85	85,27	100,32%	86,25	86,43	100,2 %	87,50	86,45	98,8%

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

A. Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tahun 2025, indeks SPBE mencapai 4,25 dengan predikat **Sangat Baik**, mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berbasis teknologi. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama, seperti kebijakan dan regulasi yang kuat, standarisasi arsitektur SPBE, serta adanya payung hukum yang jelas, termasuk Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023. Selain itu, dukungan pimpinan melalui kebijakan dan penguatan peran GCIO, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, kesiapan SDM dengan literasi digital yang baik, serta integrasi layanan dan audit TIK berkala turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas implementasi SPBE.



Grafik 1 Tren Indeks SPBE Kota Blitar Tahun 2022 – 2025

Berdasarkan grafik tren Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatas, pada tahun 2022 nilai indeks SPBE Kota Blitar sebesar 2,81. Pada tahun 2023 nilai SPBE dapat naik lagi menjadi 3,68. Pada tahun 2024 nilai SPBE naik kembali sebesar 4,11. Pada tahun 2025 nilai SPBE naik kembali hingga di 4.26.

Dengan menggunakan metode penilaian mandiri (*self assesment*) yang didasarkan dari hasil evaluasi SPBE tahun 2024 serta menindaklanjuti rekomendasi tahun 2024, hasil penilaian mandiri tingkat kematangan pada masing - masing indikator SPBE telah diinformasikan kepada Kementerian PANRB melalui lembar kerja dan bukti dukung. Pada tahun 2025 didapat data target dan realisasi penilaian SPBE di Kota Blitar seperti tabel dan grafik di atas.

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar dapat diketahui bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar telah terealisasi sebesar 4.26 atau melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 4.25 poin dengan capaian kinerja sebesar 100%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berjalan sesuai target yang direncanakan dan mendapatkan predikat nilai sangat baik. Dalam tabel predikat nilai Indeks SPBE yang dirumuskan pemerintah pusat, nilai SPBE Kota Blitar Tahun 2025 sebesar 4,25 masuk dalam kategori sangat baik ($3,5 < 4,2$). Hal tersebut juga dapat memberikan gambaran bahwa kinerja Pemerintah Kota Blitar serius dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ada 4 domain penilaian SPBE yaitu 1. domain Kebijakan internal SPBE, 2. domain tata kelola SPBE, 3. Domain Manajemen SPBE dan 4. Domain Layanan SPBE.

1. Domain 1 terbagi menjadi Aspek 1. kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian.
2. Domain 2 terbagi menjadi Aspek 2. perencanaan strategis dengan bobot nilai 10% dan terdiri dari 4 indikator penilaian, Aspek 3. teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot nilai 10% yang terdiri dari 4 indikator penilaian, serta Aspek 4. Penyelenggaraan SPBE dengan bobot nilai 5% yang terdiri dari 2 indikator penilaian.

3. Domain 3 terbagi menjadi Aspek 5. penerapan manajemen SPBE dengan bobot nilai 12% dan terdiri dari 8 indikator penilaian, Aspek 6. audit TIK dengan bobot nilai 4,5% yang terdiri dari 3 indikator penilaian.
4. Domain 4 terbagi menjadi Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan bobot nilai 27,5% dan terdiri dari 10 indikator penilaian dan Aspek 8. Layanan Publik berbasis elektronik dengan bobot nilai 18% dan terbagi menjadi 6 indikator penilaian.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Blitar selama periode tahun 2022 - 2025 tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar agar SPBE dapat berjalan dengan baik. Upaya-upaya tersebut antara lain :

a. Tahun 2022

- Menyusun dokumen arsitektur SPBE
- Menyusun dokumen standar layanan pusat data dan pemulihan bencana TIK
- Menyusun dokumen standarisasi pembangunan dan keamanan sistem aplikasi
- Mengadakan rapat koordinasi persiapan penilaian mandiri SPBE
- Mengikuti dan memfasilitasi pelaksanaan asistensi penerapan SPBE oleh KemenPANRB
- Menyediakan dan mengembangkan aplikasi layanan data terbuka (ADATA)
- Menyediakan aplikasi layanan pengaduan pelayanan publik (ULPIM)
- Menyediakan aplikasi layanan publik sektor 1 (SILPUSITRON)

b. Tahun 2023

- Memfasilitasi pelaksanaan asistensi kegiatan pendukung SPBE tahun 2023
- Mengadakan desk rencana kegiatan pendukung SPBE

- Memfasilitasi review peta rencana SPBE
 - Mengadakan sosialisasi audit TIK oleh narasumber BRIN
 - Memfasilitasi pembahasan penyusunan draft SK Walikota tentang tim audit internal SPBE
 - Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan audit aplikasi SIPAK oleh tim audit internal
 - Mengadakan monev pemanfaatan SPLP
 - Menyediakan aplikasi layanan pengaduan pelayanan publik (ULPIM, WA sender), layanan data terbuka (ADATA, OPEN DATA), dan layanan publik sektor 1 (DAWAMI MANTAN)
- c. Tahun 2024
- Memfasilitasi pelaksanaan penekanan tugas, asistensi dan evaluasi pemenuhan indikator SPBE
 - Mengadakan sosialisasi evaluasi SPBE tahun 2024
 - Mengadakan diskusi pemenuhan bukti dukung penilaian SPBE tahun 2024
 - Mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengisian aplikasi SIA SPBE
 - Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan audit infrastruktur oleh tim audit internal
 - Mengadakan pelatihan SPLP
 - Memfasilitasi koordinasi pengintegrasian SIPKOI ke dalam SPLP
 - Menyediakan aplikasi layanan pengaduan pelayanan publik (ULPIM, WA sender), layanan data terbuka (ADATA, OPEN DATA), dan layanan publik sektor 1 (BLITAR SEJAHTERA)
- d. Tahun 2025
- Melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE secara mandiri
 - Mengikuti sosialisasi Pemerintahan Digital yang diadakan oleh KemenPANRB

Tahun 2026 merupakan tahun peralihan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Pemerintahan Digital sehingga Pemerintah Kota Blitar perlu mempersiapkan beberapa hal

untuk menyongsong implementasi Pemerintahan Digital di daerah. Adapun upaya-upaya awal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun arsitektur dan peta rencana Pemerintahan Digital sebagai kerangka acuan pelaksanaan Pemerintahan Digital di lingkup Pemerintah Kota Blitar yang memperhatikan dan menyelaraskan dengan dokumen RPJMD yang ada
2. Menyelenggarakan rakor kolaborasi penyelenggaraan Pemerintahan Digital sebagai wadah dalam penyamaan persepsi dan sarana pengenalan mengenai Pemerintahan Digital
3. Menyusun tim koordinasi Pemerintahan Digital lingkup Pemerintah Kota Blitar serta menyusun rencana kerja tim

B. Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK

Misi ke 5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi, digitalisasi layanan publik memiliki peran yang sangat krusial. Semakin tinggi persentase layanan publik yang online dan terintegrasi, semakin efektif pula upaya pemerintah dalam menciptakan sistem yang transparan, efisien dan akuntabel. Persentase layanan publik online dan terintegrasi dapat dicapai dan didukung dengan adanya perencanaan yang matang dalam layanan publik online dan terintegrasi sehingga langkah-langkah implementasi yang sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan layanan publik dapat direncanakan secara matang yang meliputi penentuan dalam peta rencana SPBE, identifikasi dan integrasi sistem, penguatan regulasi dan kebijakan, dan juga koordinasi antar pemangku kepentingan.

C. Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik

Kota Blitar berhasil mempertahankan predikat sebagai Kota Informatif dengan nilai 98.61 atas sinergi dan kolaborasi dari Perangkat Daerah. Perbaikan sistem kerja, komitmen pimpinan, dan partisipasi

aktif dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan Kota Blitar sebagai kota informatif. Keterbukaan informasi publik tidak hanya diwujudkan di salah satu aspek saja melainkan dari berbagai aspek sudah lebih diperhatikan seperti, pelayanan, ketersediaan informasi, digitalisasi, hingga sarana prasarana. Capaian ini juga mendukung misi kelima, yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Presentase tindak lanjut pengelolaan pengaduan yang mencapai 100% berhasil dicapai karena adanya tata laksana pengelolaan pengaduan yang jelas, pelatihan pengembangan kompetensi bagi pejabat pelaksana dan petugas pelayanan pengelolaan pengaduan, hingga komitmen kuat para pimpinan dalam menangani aduan yang masuk. Hal ini menjadi bukti komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar dalam mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan Kota Blitar yang baik dengan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

D. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Wali Kota Blitar sudah mengintegrasikan penyelenggaraan data dan prinsip SDI ke dalam visi dan misi Pemerintah Kota Blitar, yang tertuang pada Perda RPJMD No. 4 Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 tidak tertuang secara *eksplisit* tetapi pada Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi, pada tujuan Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi, sasaran Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Strategi Peningkatan pemanfaatan data statistik daerah pada arah kebijakan telah tercantum mengenai “Peningkatan integrasi satu data dengan aplikasi lainnya, Pemanfaatan data statistik daerah serta Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral.

Hasil penilaian EPSS Kota Blitar Tahun 2025 sebesar 2,92 (penilaian mandiri) meningkat jika dibandingkan dengan hasil penilaian Tahun 2024 yaitu sebesar 2,65. Hal tersebut didukung oleh

beberapa faktor diantaranya: Pemerintah Kota Blitar melalui Diskominfo Kota Blitar bersama BPS Kota Blitar memperkuat sinergi untuk memastikan integrasi data statistik sektoral yang lebih baik di lingkungan pemerintah kota. Pelaksanaan rapat evaluasi khusus dilakukan untuk membedah bukti dukung sesuai rekomendasi teknis guna mencapai nilai IPS yang optimal. Fokus pada peningkatan aspek administrasi melalui sosialisasi dan penyusunan metadata yang lebih rapi, yang menjadi salah satu indikator krusial dalam penilaian EPSS. Penyelenggaraan Bimtek Statistik Sektoral bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas data, standar data, dan aspek teknis lainnya. Fokus pembinaan diarahkan pada Perangkat Daerah yang menjadi lokus penilaian agar kualitas dokumen dan proses statistik memenuhi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator EPSS.

E. Meningkatnya Keamanan Informasi

Upaya peningkatan keamanan informasi terus diupayakan dengan menggelar berbagai kegiatan sebagai implementasi dari Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

Kegiatan mendapatkan dukungan dari instansi Pembina yaitu BSSN maupun K/L/D/I lainnya berkaitan dengan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi, peningkatan kompetensi sumberdaya keamanan informasi, pelaksanaan keamanan informasi, penyediaan layanan keamanan informasi dan operasionalisasi jaring komunikasi sandi.

Efektifitas implementasi keamanan informasi pada tahun 2025 telah dilakukan dengan melakukan pengukuran kematangan tingkat pengamanan informasi secara mandiri menggunakan Indeks KAMI.

Indeks KAMI merupakan alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan

kematangan) kerangka kerja keamanan informasi suatu organisasi. Evaluasi dilakukan terhadap area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra

Bila melihat capaian data tahun 2025 seperti diatas, dan dibandingkan dengan rencana target pencapaian di akhir Renstra pada tahun 2025 maka dapat dilihat perbandingannya seperti tabel berikut :

Table 17 Perbandingan Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,45	4,26	123%
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	100%	100%	100%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	100	98.61	98.61%
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100%	100	100%
	Indeks Pembangunan Statistik	3,1	2,92	94.19%
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	69,77%	62,02	88.89%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,75	86.45	97,40%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Salah satu fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam ikut serta proses pencapaian tujuan Nasional dibidang Komunikasi dan Informatika adalah dengan membandingkan realisasi kinerja daerah sesuai dengan SPM Nasional, sampai dengan tahun 2025 perbandingan realisasinya adalah sebagai berikut :

Table 18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional Tahun 2025	Realisasi Daerah Sekitar				Keterangan
				Kab. Tulungagung	Kab Blitar	Kota Malang	Kota Kediri	

Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	98.61	-	18.64	89.67	95.91	22.67	Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 15.1/S K/KI- Prov.Jatim/XI/ 2025 Tentang Hasil Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
--	------------------------	-------	---	-------	-------	-------	-------	---

Secara geografis, Kota Blitar memiliki kedekatan wilayah dengan Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, dan Kota Malang. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja keterbukaan informasi publik menjadi lebih relevan karena dipengaruhi oleh kesamaan karakteristik wilayah, akses infrastruktur informasi, serta kapasitas kelembagaan PPID. Perbandingan ini dapat menjadi dasar

analisis untuk melihat posisi dan daya saing Kota Blitar di tingkat regional.

Berdasarkan hasil Monev PPID Tahun 2025, Kota Blitar memperoleh nilai **95,91**, paling tinggi dibandingkan Kabupaten Blitar (**89,67**), Kabupaten Tulungagung (**18,64**), dan Kota Kediri (**22,67**). Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Blitar telah berjalan lebih optimal dibandingkan daerah sekitar. Nilai ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan, tata kelola PPID, serta komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Tingginya capaian Nilai Hasil Monev PPID Kota Blitar menunjukkan bahwa strategi penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi telah dilaksanakan secara konsisten. Hal ini menegaskan bahwa Kota Blitar berada pada posisi yang unggul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 15.1/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi.

A. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar didukung melalui anggaran APBD 2025 sebagai berikut :

1.	Belanja Langsung	:	Rp. 15.629.337.092
-----------	-------------------------	----------	---------------------------

Dari APBD 2025 tersebut, hingga bulan Desember tahun 2025 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 15.005.918.098 atau sebesar 96.01% .Adapun realisasi belanja langsung tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat disampaikan sebagai berikut :

Table 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

N O	Uraian	Jumlah (Rp)	
----------------	---------------	------------------------	--

		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	BELANJA DAERAH	15.629.337.0 92,00	15.629.337.0 92,00	96,01 %
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.522.216.8 46,00	14.279.904.5 70,00	98,33 %
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.052.229.29 6,00	5.598.589.41 4,00	92,50 %
4	Perencanaan. Panganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.600.000,0 0	11.454.000,0 0	98,74 %
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00 %
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.943.000,00	98,10 %
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000,00	5.541.000,00	98,95 %

8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.646.810.785,00	4.279.140.152,00	92,09 %
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.646.010.785,00	4.278.350.552,00	92,09 %
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	800.000,00	789.600,00	98,70 %
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.741.940,00	79.462.650,00	99,65 %
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.886.439,00	7.870.500,00	99,80 %
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71.855.501,00	71.592.150,00	99,63 %
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.889.900,00	205.086.505,00	99,61 %
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.636.600,00	8.616.600,00	99,77 %
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.020.600,00	9.677.640,00	96,58 %

17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.619.900,0 0	31.342.400,0 0	99,12 %
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.615.000,0 0	39.511.500,0 0	99,74 %
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.532.800,00	2.523.900,00	99,65 %
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	3.960.000,00	99,00 %
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.465.000, 00	109.454.465, 00	99,99 %
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.282.800, 00	143.696.399, 00	95,62 %
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.282.800, 00	143.696.399, 00	95,62 %
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.264.305, 00	567.119.722, 00	88,30 %
25	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	393.435.305, 00	319.931.412, 00	81,32 %
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.829.000, 00	247.188.310, 00	99,34 %

27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.639.566,00	312.313.738,00	98,95 %
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.870.266,00	83.187.698,00	99,19 %
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.371.500,00	111.259.600,00	99,90 %
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.397.800,00	117.866.440,00	97,90 %
31	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.216.536.136,00	3.120.111.099,00	97,00 %
30	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.216.536.136,00	3.120.111.099,00	97,00 %
31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	202.595.372,00	202.150.500,00	99,78 %

32	Pelayanan Informasi Publik	611.097.000,00	604.040.748,00	98,85 %
33	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	24.751.500,00	24.547.000,00	99,17 %
34	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.340.856.264,00	2.253.386.051,00	96,26 %
35	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	37.236.000,00	35.986.800,00	96,65 %
42	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.992.277.310,00	5.943.676.137,00	99,19 %
43	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.990.004,00	68.963.000,00	97,14 %
44	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	70.990.004,00	68.963.000,00	97,14 %

45	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.921.287.306,00	5.874.713.137,00	99,21 %
46	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	449.085.911,00	427.820.272,00	95,26 %
47	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.472.201.395,00	5.446.892.865,00	99,54 %
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	340.838.700,00	335.834.550,00	98,53 %
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200.529.150,00	198.470.445,00	98,97 %
61	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200.529.150,00	198.470.445,00	98,97 %
62	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	55.380.000,00	55.266.891,00	99,80 %

63	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	119.047.150,00	117.201.030,00	98,45 %
64	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	26.102.000,00	26.002.524,00	99,62 %
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	167.765.200,00	145.387.251,00	86,66 %
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	167.765.200,00	145.387.251,00	86,66 %
70	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	152.025.200,00	129.838.224,00	85,41 %
71	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.179.200,00	4.095.270,00	97,99 %

72	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	132.746.000,00	114.722.954,00	86,42 %
73	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	9.900.000,00	7.780.000,00	78,59 %
74	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.200.000,00	3.240.000,00	62,31 %
75	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	15.740.000,00	15.549.027,00	98,79 %
76	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.740.000,00	15.549.027,00	98,79 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar sebesar Rp. 15.005.918.098 atau sebesar 96.01% dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.629.337.092,00.

1. Menghitung Alokasi Per Tujuan dan/atau Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat diuraikan pada tabel berikut:

Table 20 Alokasi per Tujuan dan/atau Sasaran Pembangunan

Tujuan/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	9.407.644.932	63.70
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.598.589.414,0 0	37.30

Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	5.943.676.137,0 0	39.60
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	3.120.111.099,0 0	20.79

	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	198.470.445,00	1.32
	Indeks Pembangunan Statitisk		
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	145.387.251,00	0.96

Dari tabel tersebut bahwa anggaran terbesar dari Dinas Kominfo dan Statistik pada tahun 2025 adalah untuk mendukung sasaran Persentase layanan publik online dan terintegritasi pada OPD dialokasikan Rp. 5.943.676.137 atau 39.60% dari pagu anggaran Diskominfo, Nilai Hasil Monev PPID dan Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dialokasikan Rp. 3.120.111.099,00 atau 20.79% dari pagu anggaran Diskominfo. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi Pembangunan dan Indeks Pembangunan Statitisk dialokasikan Rp. 198.470.445,00 atau 1.32% dari pagu anggaran Diskominfo. Indeks KAMI Rp. 145.387.251,00 atau 0.96% dari pagu anggaran Diskominfo. Hal ini diperuntukkan untuk Meningkatkan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk mencapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah

dialokasikan Rp. 5.598.589.414,00 atau mencapai 37.30% dari pagu anggaran Diskominfo.

2. Menghitung Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar dijabarkan dalam tabel berikut:

Table 21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	4,25	4,26	100.23%	9.577.107.796	9.407.644.932	98,23%

Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100 %	100%	100%	5.992.277 .310,00	5.943.676 .137,00	99.19%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	98	98,61	100.62%	3.216.536 .136,00	3.120.111 .099,00	97,00%
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %	100%	100,00%			

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100	100	100,00%			
	Indeks Pembangunan Statistik	2,9	2.92	100.68%	200.529.150,00	198.470.445,00	98,97%
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	62,02	62.02	100%	167.765.200,00	145.387.251,00	86,66%

		87,50	86,45	98,8%			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				5.488.349.036,00	5.352.501.123,00	97,52%

3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar ditunjukkan dalam tabel berikut :

Table 22 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	100.23%	98,23%	1.02

2	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100%	99,19%	1.00
3	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	100.62 %	97%	1.03
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100,00 %		

4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100,00 %	98,97%	1.01
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100.68 %		
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	100%	86.66%	1.15
6	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98.8%	97,52%	1.01

Berikut beberapa faktor pendukung pelaksanaan efisiensi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar:

1. Kegiatan penerapan keamanan SPBE (edukasi kesadaran keamanan SPBE dan penilaian kerentanan SPBE) yang berbentuk Sosialisasi, Bimtek, dan/atau Focus Group Discussion (FGD) yang semula Narasumber hadir secara fisik menggunakan metode tatap muka (offline) diubah dengan metode virtual meeting (online) dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (Zoom, Google Meet, dll.);
2. Pengurangan jumlah peserta yang menghadiri kegiatan (Sosialisasi, Bimtek, FGD);
3. Pengurangan volume kegiatan Sosialisasi, Bimtek, FGD;
4. Memaksimalkan negosiasi harga yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen pada saat melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pemotongan, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan efektif. Selain itu juga dengan membuat prioritas yang tepat, Optimalisasi Sumber Daya, Monev yang ketat/ cermat, dan perencanaan yang matang.

Tujuan Dinas dengan indikator Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, capaian kinerja 100.23% dengan capaian anggaran sebesar 98,23% maka Tingkat efisiensi mencapai 1.02 Sasaran strategis yang pertama dengan indikator persentase layanan publik online dan terintegrasi, capaian kinerja 100%, dengan capaian anggaran sebesar 99,19%, maka tingkat efisiensi mencapai 1.00 Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis pertama efisien, karena capaian kinerja dari persentase layanan publik lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran pengelolaan aplikasi informatika

Untuk sasaran strategis yang kedua dengan indikator Nilai Hasil Monev PPID, capaian kinerja 100.62% , dengan capaian anggaran sebesar 97% , maka tingkat efisiensi mencapai 1.03. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis kedua efisien, karena capaian

kinerja dari persentase layanan publik lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Untuk sasaran strategis yang ketiga dengan indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, capaian kinerja 100,00%, dengan capaian anggaran sebesar 98,97%, maka tingkat efisiensi mencapai 1.01. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis ketiga efisien, karena capaian kinerja dari persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran penyelenggaraan statistik sektoral.

Untuk sasaran strategis yang keempat dengan indikator Indeks KAMI, capaian kinerja 100%, dengan capaian anggaran sebesar 86.66%, maka tingkat efisiensi mencapai 1.15. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis keempat efisien, karena capaian kinerja dari Indeks KAMI lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Untuk sasaran strategis yang kelima dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja 98.8%, dengan capaian anggaran sebesar 97,52%, maka tingkat efisiensi mencapai 1.01 Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis keempat efisien, karena capaian kinerja dari indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

B. Prestasi dan Penghargaan

Berikut beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar selama tahun 2025:

1. Juara 2 Lomba Innovative Government Award (IGA) 2025
2. KI AWARD sebagai BDAN PUBLIK INFORMATIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA – JAWA TIMUR
3. Terbaik 3 Program Komunikasi Publik di ajang Jatim Public Relations Award (JPRA) kategori media audio visual 2025

4. Terbaik 3 Program Komunikasi Publik di ajang Jatim Public Relations Award (JPRA) kategori media sosial 2025
5. Terbaik 1 Program Komunikasi Publik di ajang Jatim Public Relations Award (JPRA) kategori video kreatif 2025
6. Terbaik V Satu Data (SATA) Jatim Award 2025

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai alat evaluasi untuk bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. LKjIP juga disusun sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 maupun Renja 2026 dikategorikan sangat berhasil karena memperoleh capaian rata-rata 100.04% (*Seratus Koma Nol Empat Persen*).

Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran pada Tujuan “Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran 1 :

Persentase layanan publik online dan terintegrasi, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% (seratus persen) masuk kategori sangat berhasil;

2. Indikator Sasaran 2 :

Nilai hasil monev PPID, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100.62% (seratus koma enam puluh dua persen) masuk kategori sangat berhasil;

Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% (seratus persen) masuk kategori sangat berhasil;

3. Indikator Sasaran 3 :

Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% (Seratus Persen) masuk kategori sangat berhasil;

Indeks Pembangunan Statistik nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100.68% (Seratus Koma Enam Puluh Delapan Persen) masuk kategori sangat berhasil;

4. Indikator Sasaran 4 :

Indeks KAMI, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% (Seratus Persen) masuk kategori sangat berhasil.

5. Indikator Sasaran 5 :

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah nilai capaian kinerja sasaran sebesar 98.8% (Sembilan puluh delapan koma delapan persen) masuk kategori sangat berhasil.

B. Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2025

Berikut adalah rancana tindak lanjut LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024:

Table 23 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
1	a) Belum optimalnya pelaksanaan audit TIK b) Kesesuaian arsitektur maupun peta rencana SPBE dengan realisasi kegiatan masih belum optimal	a) Menyiapkan dokumen arsitektur Pemdi sebagai acuan pelaksanaan pemerintahan Digital di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana	a. Tersedianya dokumen arsitektur Pemdi b. Terlaksananya koordinasi terkait pelaksanaan audit TIK c. Terbentuknya tim	√		

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
		b) Melaksanakan koordinasi bersama dengan Stakeholder terkait pelaksanaan audit TIK c) Membentuk tim koordinasi Pemdi serta menentukan pembagian tugas dari masing-masing anggota tim	SPBE pemerintah daerah	koordinasi Pemdi d. Terlaksananya rakor kolaborasi Pemdi			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
		d) Melaksanakan rakor kolaborasi penyelenggaraan Pemdi guna persanaan persepsi sebagai persiapan implementasi Pemerintahan Digital					
1	PD yang hanya menggunakan aplikasi milik pemerintah pusat	● Koordinasi antar PD untuk merekap jenis layanan publik	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi terkait jenis layanan publik yang	√		

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	sehingga memerlukan penyediaan aplikasi layanan publik dan terintegrasi di tingkat daerah	online dan terintegrasi yang telah tersedia maupun menetapkan target layanan yang akan disediakan/dipenuhi	- Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	telah tersedia maupun yang akan disediakan/dipenuhi			
2	● Pengisian SAQ masih memerlukan penyempurnaan pada aspek kelengkapan profil pimpinan dan penataan	● Melakukan pemutakhiran dan pelengkapan profil pimpinan daerah secara berkala	- Program Informasi Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Tersedianya profil pimpinan yang lebih lengkap. Rujukan dokumen pendukung	√	√	

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	rujukan dokumen pendukung ● Belum optimalnya persiapan teknis wawancara, khususnya dalam penyelarasan narasi dan penekanan substansi jawaban dengan indikator penilaian ● Proses integrasi kanal pengaduan perangkat daerah dengan	● Menyederhanakan dan menata rujukan dokumen pendukung pada pengisian SAQ agar lebih terstruktur ● Menyiapkan ringkasan narasi kunci keterbukaan informasi sebagai bahan pendukung wawancara pimpinan ● Meningkatkan koordinasi dan	Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik - Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	lebih disederhanakan. Persiapan wawancara lebih optimal dengan penyediaan ringkasan narasi kunci Meningkatnya sinergi dan kolaborasi dengan PPID Pelaksana			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	SP4N LAPOR! belum berjalan secara optimal dan konsisten ● Sosialisasi dan kampanye pengelolaan pengaduan masih bersifat insidental dan belum didukung dengan perencanaan yang terjadwal dan berkelanjutan ● Pemanfaatan kanal pengaduan pada perangkat daerah masih	sinergi bersama PPID Pelaksana dalam persiapan monev keterbukaan informasi publik tahun berikutnya ● Menyusun inovasi Kelurahan Informatif untuk memperluas layanan keterbukaan informasi publik hingga		sehingga pemenuhan Monev KI lebih mudah dan cepat. Terlaksananya inovasi Kelurahan Informatif yang tersedia			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	kurang efektif, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi pencatatan dan penanganan aduan ● Keterbatasan jumlah serta kapasitas SDM yang ditugaskan sebagai pengelola pengaduan ● Masih adanya disposisi/pemilahan dari admin pusat yang kurang tepat sehingga	tingkat kelurahan ● Melakukan monitoring pelaksanaan integrasi pengaduan, pendampingan input manual pengaduan, serta melakukan penyegaran melalui Bimbingan Teknis bagi admin pengelola pengaduan agar integrasi		● Meningkatkan jumlah peragat daerah yang konsisten melakukan input			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	menyebabkan keterlambatan penanganan aduan	dapat berjalan lebih konsisten ● Menyusun strategi sosialisasi pengaduan masyarakat secara terjadwal dengan memanfaatkan berbagai media pemerintah daerah dan menggandeng UPT, Kelurahan, dan Kelompok Informasi Masyarakat		man ual peng aduan ke SP4N LAPO RI! ● Terse diany a conte nt matri x meng enai sosia lisasi peng			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
		● Penataan kanal pengaduan pada perangkat daerah, identifikasi alur pengelolaan pengaduan, serta penyelarasan mekanisme pencatatan aduan yang masuk ke berbagai kanal agar tetap terdokumentasi dan terpantau SP4N LAPOR! ● Memperkuat tata kelola		elola an peng aduan yang terstr uktu r serta meni ngka tnya pelak sana an sosia lisasi secar a			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
		pengaduan dengan peningkatan kapasitas dan keberlanjutan SDM pengelola pengaduan, pembaruan SK Tim Pengelola Pengaduan sesuai dengan dinamika kepegawaian dan struktur organisasi ● Optimalisasi mekanisme disposisi dan verifikasi aduan dengan		terjadwal ● Tersedianya dokumen hasil pemetaan kanal pengaduan perangkat daerah			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
		penguatan standar operasional prosedur sehingga penyaluran aduan ke perangkat daerah terkait dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan sesuai kewenangan		serta meningkatkan keterpaduan pencatatan aduan pada berbagai kanal • Tersedianya			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
				laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan dan SK Tim Peng			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
				elola Peng aduan yang diper barui serta meningkatkan kesiapan SDM pengelola pengaduan.			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
				Terse dianya SOP Pelayanan dan Tindak Lanjut Pengaduan yang dise mpurnakan serta			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
				terselenggara monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala.			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
3	● belum optimalnya kemampuan sebagian Perangkat Daerah dalam mengelola metadata statistik sesuai prinsip Satu Data Indonesia ● Munculnya ego sektoral yang mengakibatkan duplikasi data serta perbedaan definisi operasional antar Perangkat Daerah	● Inventarisasi elemen data statistik sektoral yang dimuat dalam dokumen Renja dan LKjIP dalam bentuk Nota Dinas dan/atau Laporan Hasil Sinkronisasi Data Statistik Sektoral Daerah pada SIPD e-WalidataData (BPS), Koordinator data (Bappeda) serta OPD selaku produsen data	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	● DSS D yang di publikasikan pada portal satu data telah di manfaatkan oleh perangkat	√	√	

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	● Belum tertibnya pengarsipan dokumen kegiatan statistik	dalam penyusunan data statistik sectoral. ● meningkatkan kompetensi ASN pengelola data dalam metodologi statistik dan pemanfaatan data ● memperkuat peran statistisi dan pranata komputer melalui pelatihan dari instansi pembina seperti BPS dan Kementerian Kominfo		t Daerah dalam merumuskan Rencana Kerja dan Evaluasi pembangunan ● ASN mampu menyusun			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
		Melakukan penertiban arsip dokumen pelaksanaan kegiatan statistik di seluruh Perangkat Daerah.		- Metadata kegiatan statistik dan menginput ke dalam aplikasi INDAH BPS yang terintegrasi dengan Open Data Kota Blitar - Terpenuhinya bukti dukung EPSS			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
				2025 (Penilaian Mandiri) sehingga nilainya meningkat dari tahun sebelumnya			
4	Rendahnya pemahaman aparat Perangkat Daerah terhadap pentingnya kegiatan penilaian	bimbingan teknis penilaian tingkat keamanan informasi dan penyediaan template	- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya capaian nilai tingkat keamanan informasi berdasarkan kerangka kerja Indeks KAMI 5.0 /	√		

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	keamanan informasi; ● Ketidaksiapan aparatur dalam menyediakan dokumen bukti dukung dalam kegiatan penilaian keamanan informasi. ● Belum optimalnya upaya tindak lanjut aparatur	dokumen bukti dukung	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik -	IKASANDI sekurang - kurangnya bernilai Baik			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	Perangkat Daerah pasca dilakukan kegiatan koordinasi pengukuran tingkat keamanan informasi;						
5	● Belum optimalnya sistem integrasi data (crosscutting) baik secara internal maupun eksternal.	● Mewajibkan pencantuman inovasi strategis dalam Renstra 2025-2029, meningkatkan kecermatan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya sistem integrasi data (crosscutting) baik secara	√		

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	● Hambatan dalam menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator sehingga dokumen perencanaan tahunan kurang sinkron. ● Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak konsisten antara Renstra, Renja, dan LKjIP. ● Kecenderungan pegawai dalam menyusun laporan yang hanya bersifat normatif atau	penyusunan dokumen tahunan terkait indikator sasaran, serta menyusun SOP baku (melalui Keputusan Walikota) untuk tata kelola data statistik dan koordinasi crosscutting ● Memastikan konsistensi IKU di seluruh dokumen perencanaan	- Kegiatan Perencanaan. Penganggaran . dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	internal maupu Tersusun ya SOP yang sudah di reviu Tersusunya dokumen Renstra, Renja, dan LKjIP yang selarasn dengan melakukan koordinasi dan evaluasi			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
	sekadar imbauan, tanpa didukung bukti aktivitas nyata yang terukur. ● Rendahnya kesadaran pegawai dalam melakukan penginputan data kinerja secara tepat waktu dan akurat. ● Kurangnya ketajaman dalam mengidentifikasi rencana aksi yang efektif,	(Renstra, Renja, LKjIP) ● mempertegas kedisiplinan penginputan data kinerja agar tepat waktu. ● Mengoptimalkan identifikasi rencana aksi		menyeluruh terhadap dokumen Renstra, Renja dan LJKIP - Tersedianya laporan yang bersifat deskriptif / positif berdasarkan fakta dan data objektif			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
				- Terlaksananya penginputan data kinerja secara tepat waktu dan akurat oleh seluruh ASN - Tersusunnya rencana aksi yang efektif dan optimal sesuai tugas pokok			

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026(perubahan)	Tahun 2027
				dan fungsinya			

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada LKjIPInstansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 , semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. Semoga dokumen LKjIP ini dapat berguna bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR 2021-2026

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

MISI : 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		K E T
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	(Bobot x Domain Kebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)	2,88	4.25	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi /Jumlah layanan publik x 100 %	81	100 %	Penguatan tata kelola SPBE	- Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK - Peningkatan integrasi	

											aplikasi layanan public	
					Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	71	98			

						Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR *	100 %	Peningkatan sistem keterbukaan informasi publik	• Peningkatan kualitas pemerintahan dan layanan publik • Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi publik	
--	--	--	--	--	--	---	--	-------	---	---	--

					Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	94,83	100%	Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan kuantitas dan kualitas Data Sektoral untuk mendukung Satu Data Indonesia	
--	--	--	--	--	--	--	---	-------	------	--	--	--

					Indeks IPS	$\sum \text{bobot domain } k \times \text{nilai domain } k, k=1$		2,9			
					Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	20,31	62.02	Peningkatan Keamanan Informasi	Peningkatan peran dan kapasitas BLITAR KOTA-CSIRT
					Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar		87.50		

LAMPIRAN II

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR**

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	KEGIATAN /	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatkan layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100 %	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan	95,00 %	5.992.277.310	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public	100 persen	70.990.004

				publik				sesuai aturan		
							Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	70.990.004
							Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	98%	5.921.287.306

							Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	449.085.911
							Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	5.472.201.395

Meni ngkat nya siste m keter buka an infor masi publi k	Nilai Hasi l Mon ev PPID	96	PROGR AM INFOR MASI DAN KOMU NIKASI PUBLI K	Pers entas e dise mina si dan layan an infor masi publi k yang dilak sana kan sesu ai deng an strat egi kom unika si (STA RKO M) dan SOP	90 % 95 %	3.21 6.53 6.13 6	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentas e masyarak at yang menjadi sasaran penyebara n informasi publik	68.5 %	3.216. 536.13 6

				yang Ditet apka n Pers entas e kom unita s masy araka t /mitr a strat egis peme rinta han daer ah yang meny ebar infor masi dan kebij akka n							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				pemerintah daerah						
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %					Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	202.595.372
							Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai	700 Perumahan	611.097.000

								peraturan perundangan		
							Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5 Rekomendasi	24.751.500
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar	6 Media	2.340.856.264

								sesuai kriteria/juknis		
							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	80 Orang	37.236.000
Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	98.31%	200.529.150	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100%	Rp200.529.150,00

	ncan aan pem ban gun an dan eval uasi pem ban gun an									
	Inde ks IPS	2,9					Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunak an data Statistik untuk Perencanaa n, Monitoring, dan Evaluasi Pembangun an dan/atau Penyusunan Kebijakan	90%	Rp55.3 80.000 ,00

							Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80%	Rp119.047.150,00
							Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Rp26.102.000,00
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	62,02%	PROGRAM PENYELANGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	62,02%	167.765.200	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	62.02 Persen	152.025.200

				ah Daer ah Kabu pate n/Kot a						
							Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dok ume n	4.179. 200
							Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaa n Sumber Daya Keamanan	4 lapo ran	132.74 6.000

								Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		
							Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 lapo ran	9.900. 000
							Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengguna kan Layanan Keamanan Informasi	21 PD	5.200. 000

							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	75,00%	15.740.000
							Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 PD	15.740.000
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	6.05 2.22 9.29 6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	11.600.000

							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	Rp3.000.000,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	Rp3.000.000,00
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Rp5.600.000,00

							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Rp4.646.810.785,00
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	Rp4.646.010.785,00
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 laporan	Rp800.000,00

								Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S emesteran SKPD		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	79.741 .940
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 paket	Rp7.886.439,00
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	100 Orang	Rp71.855.501,00

								Peraturan Perundang- Undangan		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	205.88 9.900
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp8.63 6.600, 00
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Rp10.0 20.600 ,00

							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	Rp31.619.900,00
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	Rp39.615.000,00
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp2.532.800,00
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24 dokumen	Rp4.000.000,00

								yang Disediakan		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	Rp109.465.000,00
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 %	150.282.800
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp150.282.800,00

							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100 %	642.264.305
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp393.435.305,00
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	Rp248.829.000,00

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	315.63 9.566
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	Rp83.8 70.266 ,00
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp111. 371.50 0,00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	Rp120. 397.80 0,00

								atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. HAKIM SISWORO M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Wakil Kota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR
Kota Blitar.**

Drs. HAKIM SISWORO M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196909081988091001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50()
2	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	6,25()
3	Meningkatnya layanan SPBE melalui kelengkapan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100,00(%)
4	Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	88,00()
		Persentase Tidak Layak Pengaduan Masyarakat	100,00(%)
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase GPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100,00(%)
		Indeks Pembangunan Statistik	2,90()
6	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	62,02(%)
7	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,50()

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5,992,277,316.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,216,536,136.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200,529,150.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	167,760,200.00	Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,052,229,296.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil
Total:		15,629,337,092.00	


SYAM'UL MUHIBBIN, S.H.I.
 Wali Kota Blitar,

Blitar, 20 Oktober 2025
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR**
 Kota Blitar,

Drs. HAKIM SISWORO M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196009081988091001

PENGUKURAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR 2025

Tabel Pengukuran Kinerja

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formulasi perhitungan	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian		Alokasi	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks SPBE		4,25	4,26	100.23 %		9.577.107.796	9.407.644.932	98,23 %
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik on line dan terintegrasi/Jumlah layanan publik x 100 %	100 %	100%	100%	Program Aplikasi Informatika	5.992.277.310,00	5.943.676.137,00	99.19 %

Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	98	98,61	100.62 %	Program Informasi Komunikasi Publik	3.216.536.136,00	3.120.111.099,00	97,00 %
	Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%	100 %	100%	100,00%				

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%	100 %	100%	100,00%	Program penyelenggaraan Statistik	200.529.150,00	198.470.445,00	98,97 %
	Indeks Pembangunan Statistik	$\sum \text{ bobot domain } k \times \text{nilai domain } k$ $k=1$	2,9	2.92	100.68 %				
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/ Jumlah area penilaian x 100 %	62,02	62.02	100%	Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	167.765.200,00	145.387.251,00	86,66 %

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	87,50	86,45	98,8%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.488.349.036,00	5.352.501.123,00	97,52 %
---------------------------------------	------------------------------	--	-------	-------	-------	--	------------------	------------------	---------



Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar